

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 September 2018/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : MAHKAMAH SYARIAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SUB UNIT KERJA : MAHKAMAH SYARIAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RATNA JUITA
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 480979

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.925.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 627 m2/200 m2 di KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/40 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 206.000.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 17.021.663**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 2.148.021.663**III. HUTANG** Rp. 320.999.572**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.827.022.091

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.